

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENANGKAPAN IKAN TERUKUR DAN MEKANISME PNBP PASCA PRODUKSI DI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI KLIDANG LOR JAWA TENGAH

*Effectiveness of Measured Fishing Policy and Post-Production Non-Tax State Revenue
Mechanism at Klidang Lor Coastal Fisheries Port, Central Java*

Oleh:

Eli Nurlaela^{1*}, Muhamad Ripaldi¹, Aman Saputra¹, Hery Choerudin²,
Sakti Pandapotan Nababan¹

¹Teknologi Penangkapan Ikan, Politeknik Ahli Usaha
Perikanan, Jakarta, Indonesia

²Teknologi Perikanan Laut, Institut Pertanian Bogor,
Indonesia

*Korespondensi penulis: elimumtaza@gmail.com

ABSTRAK

Perikanan tangkap memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, namun keberlanjutannya terancam oleh praktik penangkapan yang tidak terkendali. Penelitian ini menganalisis penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan mekanisme pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pasca produksi di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Klidang Lor, Jawa Tengah. Penelitian dilakukan pada awal 2024 dengan pendekatan deskriptif, melibatkan 33 nelayan melalui metode *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa migrasi izin usaha kapal perikanan ke pusat dalam rangka penerapan kebijakan PIT sesuai Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2023 telah berjalan dengan baik. Mayoritas nelayan tidak menghadapi kesulitan dalam pelaporan Laporan Perhitungan Mandiri (LPM) dan pembayaran PNBP. Namun, kendala terkait ketersediaan alat timbang dan ketidakakuratan dalam pengisian LPM masih perlu diperhatikan. Sistem pembayaran PNBP berbasis volume tangkapan di PPP Klidang Lor telah berjalan efisien dan efektif, dengan peningkatan penarikan PNBP pasca produksi sejak Maret 2023. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan adil serta dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan tata kelola sektor perikanan.

Kata kunci: pengelolaan, perikanan tangkap, PNBP pasca produksi

ABSTRACT

Capture fisheries play a crucial role in Indonesia's economy; however, their sustainability is threatened by uncontrolled fishing practices. This study analyzes the implementation of the Measured Fish Catch (PIT) policy and the post-production Non-Tax State Revenue (PNBP) payment mechanism at the Klidang Lor Coastal Fisheries Port (PPP) in Central Java. The research was conducted in early 2024 using a descriptive approach, involving 33 fishermen selected through purposive sampling. The results indicate that the migration of fishing vessel business permits to the central authority, in accordance with Government Regulation No. 11 of 2023, has been effectively implemented. Most fishermen did not encounter difficulties in reporting the Self-Assessment Report (LPM) and paying PNBP. However, issues related to the availability of weighing equipment and inaccuracies in completing the LPM still need to be addressed. The PNBP payment system based on catch volume at PPP Klidang Lor has been running efficiently and effectively, with an increase in post-production PNBP collection since March 2023. These findings contribute to the sustainable and equitable

management of fisheries and can serve as recommendations for policymakers to enhance governance in the fisheries sector.

Key words: *capture fisheries, management, post-production Non-Tax State Revenue*

PENDAHULUAN

Perikanan tangkap merupakan sektor penting dalam perekonomian nasional Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan dan kesejahteraan nelayan serta masyarakat pesisir. Berdasarkan data, produksi perikanan tangkap meningkat dari 6.424.114 ton pada tahun 2017 menjadi 7.164.302 ton pada tahun 2019 (Aprilia 2023). Hal ini menunjukkan potensi besar sektor perikanan dalam mendukung ketahanan pangan dan ekonomi lokal (Putra 2023). Namun, keberlanjutan sektor ini masih menjadi tantangan utama karena praktik penangkapan yang tidak terkendali dapat menyebabkan *overfishing* dan penurunan populasi ikan, serta mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan, seperti yang terjadi di Riau, Jawa Tengah, dan Teluk Banten (Arkham *et al.* 2021; Hutajulu *et al.* 2023; Kusdiantoro *et al.* 2019; Yuwandana *et al.* 2021). Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa komoditas seperti tuna dan cakalang mengalami tekanan signifikan akibat praktik penangkapan yang buruk (Kusumaningrum *et al.* 2021; Suhana *et al.* 2019). Beberapa faktor, seperti intensitas trip penangkapan dan persaingan antar-unit kapal, dapat menyebabkan penurunan produktivitas penangkapan (Hermawan & Nurlaela 2023). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mustaruddin *et al.* (2024), pengelolaan perikanan berkelanjutan dapat dicapai melalui pengayaan stok sumber daya ikan, pengembangan teknologi penangkapan ramah lingkungan, dan kemitraan usaha perikanan.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Pemerintah Indonesia mengimplementasikan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 (Trenggono 2023). Kebijakan ini dirancang untuk mengatur kuota tangkapan berdasarkan data ilmiah guna menjaga keseimbangan ekosistem dan memaksimalkan manfaat ekonomi bagi nelayan. PIT juga mendorong efisiensi dan produktivitas sektor perikanan, sekaligus menekankan keadilan dalam distribusi manfaat sumber daya perikanan. Kebijakan ini menekankan pembatasan kuota penangkapan sebagai kontrol *output*, guna menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan meningkatkan manfaat ekonomi bagi nelayan (Nurlaela 2023).

Seiring dengan penerapan PIT, mekanisme pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pasca produksi diharapkan dapat memberikan keadilan bagi nelayan. Sistem ini berbasis pada volume tangkapan ikan, sehingga nelayan hanya membayar setelah berhasil menangkap ikan, mengurangi risiko dan beban biaya yang tidak sesuai dengan hasil (Aprilia 2023). Implementasi PNBP pasca produksi juga melibatkan teknologi berbasis aplikasi e-PIT untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan hasil tangkapan. Melalui sistem ini, data tangkapan ikan yang di *input* oleh nakhoda kapal dapat diverifikasi oleh otoritas pelabuhan, sehingga mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data. Mekanisme ini dirancang untuk menciptakan tata kelola yang lebih adil dan berkelanjutan, sekaligus mendorong keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan (Trenggono 2023).

Penelitian terdahulu yang dilakukan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Klidang Lor, Jawa Tengah, sebagian besar menitikberatkan pada aspek produksi dan pengelolaan perikanan secara umum tanpa membahas secara mendalam implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pasca produksi. Hal ini menciptakan kesenjangan penelitian, mengingat kebijakan PIT merupakan pendekatan strategis saat ini yang dirancang untuk mengatur kuota tangkapan berbasis data ilmiah guna memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan serta meningkatkan kesejahteraan nelayan. Sementara itu, mekanisme PNBP pasca produksi, yang berbasis volume hasil tangkapan aktual, menawarkan inovasi dalam tata kelola keuangan sektor

perikanan dengan tujuan menciptakan distribusi manfaat yang lebih adil. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan berupa rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan tata kelola perikanan yang berkeadilan dan berkelanjutan, serta mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada awal tahun 2024 bertempat di PPP Klidang Lor, Jawa Tengah. Alat yang digunakan untuk pengumpulan data adalah *work sheet*, kuesioner, alat tulis, kamera, dan laptop. Data primer yang diambil dalam penelitian ini yaitu data produksi, data pembayaran PNBP pasca produksi, persepsi dan tanggapan nelayan terhadap implementasi kebijakan PIT, adaptasi nelayan terhadap mekanisme pembayaran PNBP pasca produksi serta laporan perhitungan mandiri hasil tangkapan ikan oleh nelayan. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan sampel berjumlah 33 nelayan. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan karakteristik spesifik yang relevan dengan penelitian, sehingga meningkatkan validitas data (Campbell *et al.* 2020; Palinkas *et al.* 2013). Metode ini meningkatkan ketepatan dan keandalan hasil karena sampel sesuai dengan tujuan penelitian (Campbell *et al.* 2020) dan memungkinkan pengumpulan data dari populasi yang sulit dijangkau (Palinkas *et al.* 2013). Responden dalam penelitian ini mencakup pemilik kapal dan pengurus kapal di Pelabuhan Perikanan Pantai Klidang Lor yang telah melakukan pembayaran PNBP pasca produksi. Total populasi terdiri dari 35 unit kapal berizin pusat atau kapal yang telah melalui proses pasca produksi. Ukuran sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin, yang menghitung jumlah sampel berdasarkan ukuran populasi dan batas toleransi kesalahan yang diinginkan (Alem 2024; Haerisma 2024; Kenedi 2024; Marpaung *et al.* 2023; Riwukore *et al.* 2021). Perhitungan ukuran sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat toleransi kesalahan sebesar 5% menghasilkan jumlah sampel sebesar 32,16 kapal, yang kemudian dibulatkan menjadi 33 kapal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Armada Kapal dan Produksi Perikanan di PPP Klidang Lor

Jumlah kapal perikanan di PPP Klidang Lor pada tahun 2023 tercatat sebanyak 225 unit. Berdasarkan data lapangan hingga tahun 2024, jumlah armada kapal perikanan menurun menjadi 220 unit. Pada tahun 2024, jumlah kapal perikanan jaring tarik berkantong meningkat menjadi 187 unit, sementara kapal perikanan rawai dasar menurun menjadi 22 unit (Tabel 1). Sampel kapal pasca produksi berjumlah 33 kapal, dengan mayoritas berada di kelas menengah hingga besar. Sebagian besar kapal (60,6%) memiliki kapasitas antara 30 hingga 60 *gross tonnage* (GT), sementara kapal berkapasitas lebih dari 60 GT mencakup 30,3% dari total, menunjukkan penggunaan kapal yang signifikan. Hanya 9,1% kapal yang memiliki kapasitas antara 10 hingga 30 GT.

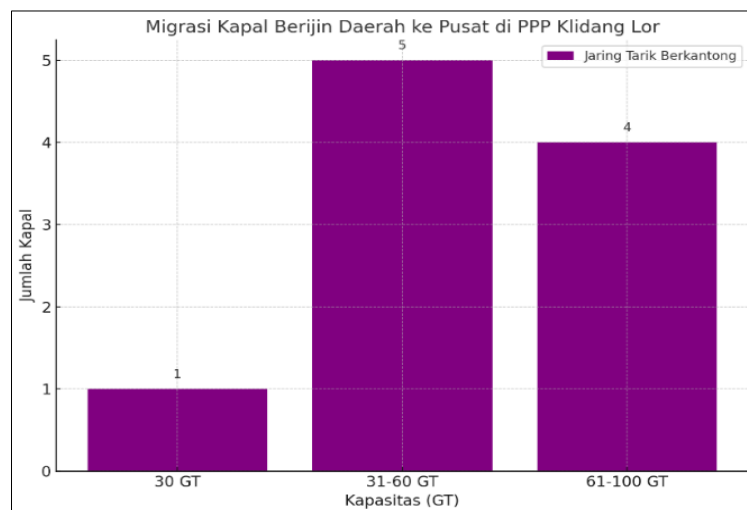
Tabel 1. Data kapal perikanan di PPP Klidang Lor tahun 2023-2024

No	Jenis Alat Penangkap Ikan	Tahun	
		2023	2024
1	JTB	184	187
2	<i>Purse Seine</i>	4	3
3	Rawai Dasar	30	22
4	Jala Jatuh Berkapal	2	2
5	Jaring Insang Hanyut	5	6
Jumlah Keseluruhan		225	220

Penurunan jumlah armada rawai dasar di PPP Klidang Lor dapat dipengaruhi oleh kepatuhan nelayan terhadap regulasi dan perubahan jenis alat tangkap (Marpaung *et al.* 2022; Putra *et al.* 2023). Pada 2024, tercatat 187 kapal jaring tarik berkantong dan 22 kapal rawai dasar, menunjukkan adanya pergeseran preferensi nelayan terhadap jenis alat tangkap tertentu (Suharyanto *et al.* 2022). Peningkatan kapal jaring tarik berkantong mencerminkan respons terhadap perubahan pasar dan kebijakan yang lebih ketat (Trenggono 2023), seperti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2021 yang melarang cantrang demi keberlanjutan sumber daya (Suharyanto *et al.* 2022). Pergeseran ini juga menunjukkan adaptasi nelayan terhadap tuntutan pasar dan regulasi yang berorientasi pada keberlanjutan dan produktivitas (Rochman *et al.* 2018). Jaring tarik berkantong dinilai lebih produktif dibandingkan alat tangkap lainnya (Zainuri & Farid 2023), menjadikannya pilihan utama nelayan untuk mempertahankan keberlanjutan usaha perikanan.

Implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan migrasi izin usaha telah berjalan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023. Meski sebagian besar nelayan mampu melaksanakan pelaporan LPM dan pembayaran PNBP secara lancar, masih terdapat kendala utama berupa keterbatasan alat timbang dan pemahaman teknis. Temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas nelayan serta perbaikan infrastruktur pendukung di pelabuhan. Selain itu, tren peningkatan PNBP pasca produksi sejak Maret 2023 mencerminkan perbaikan tata kelola dan potensi optimalisasi penerimaan negara dari sektor perikanan.

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: B.701/MEN-KP/VI/2023 tentang Migrasi Perizinan Berusaha Sub sektor Penangkapan Ikan Dan Perizinan Berusaha Sub sektor Pengangkutan Ikan, menjelaskan bahwa kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah Provinsi yang beroperasi di atas 12 mil laut wajib melakukan migrasi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Migrasi izin berusaha kapal perikanan jaring tarik berkantong dari daerah ke pusat dengan skema PNBP pasca produksi di PPP Klidang Lor pada tahun 2024 berjumlah 10 unit kapal dengan ukuran 30-100 GT. Migrasi kapal perikanan >30 GT ke pusat dapat dilihat pada Gambar 1.



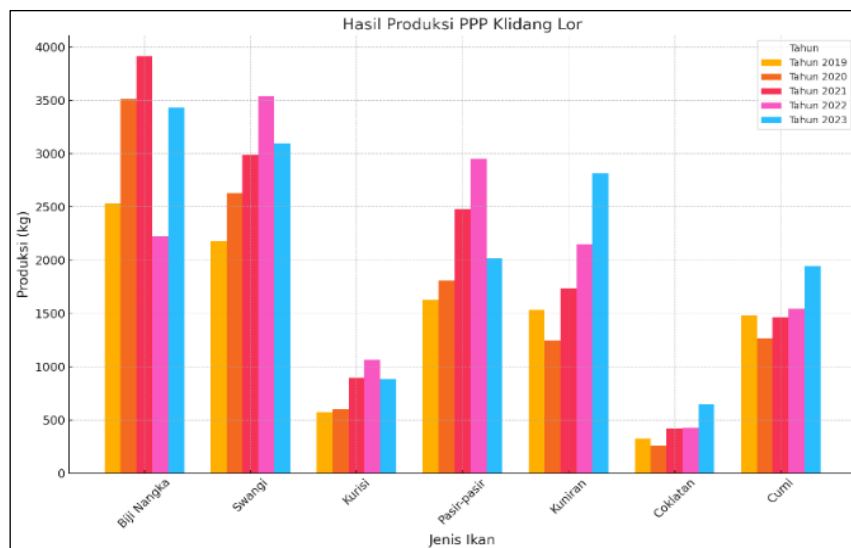
Gambar 1 Data migrasi kapal berizin daerah ke pusat di PPP Klidang Lor

Kebijakan migrasi perizinan berusaha sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: B.701/MEN-KP/VI/2023 menandai langkah penting dalam restrukturisasi tata kelola perizinan kapal penangkap dan pengangkut ikan di Indonesia. Kewajiban bagi kapal beroperasi di atas 12 mil laut untuk memigrasikan izin dari pemerintah provinsi ke pemerintah pusat memiliki sejumlah konsekuensi strategis bagi pengelolaan sumber daya perikanan dan dinamika pelaku usaha di lapangan.

Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengelolaan perikanan nasional (Arkan & Rosdiana 2024; Deswati *et al.* 2021). Migrasi perizinan ke pusat diharapkan menciptakan keseragaman regulasi dan memperjelas pembagian tanggung jawab, sehingga mengurangi ketidakpatuhan di lapangan (Aliza & Pandamdari 2022). Kesenjangan pemahaman regulasi menjadi tantangan bagi nelayan, yang diharapkan dapat teratasi melalui kebijakan terpusat ini (Arkan & Rosdiana 2024; Nurlaili *et al.* 2016). Sistem perizinan yang lebih efektif juga mendorong keberlanjutan perikanan. Kebijakan berbasis kuota yang mendukung optimalisasi pendapatan negara dan keberlanjutan sumber daya disarankan diadopsi di tingkat pusat (Karim 2020; Trenggono 2023). Pendekatan ini menuntut pelaku usaha menyesuaikan bisnis mereka dengan kebijakan yang berorientasi lingkungan (Setiawan & Setyorini 2022), sejalan dengan visi kedaulatan maritim Indonesia dan perlindungan nelayan kecil (Rahmayanti *et al.* 2017).

Terdapat 10 unit kapal jaring tarik berkantong di PPP Klidang Lor, kapal tersebut berukuran 30-100 GT yang telah bermigrasi ke pusat pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa segmen kapal menengah-besar mulai menyesuaikan diri dengan skema PNPB pasca produksi yang diberlakukan di tingkat pusat. Dengan migrasinya kapal ke pusat, skema PNPB pasca produksi menjadi lebih efektif diterapkan karena sistem pelaporan dan pembayaran terpusat langsung di bawah pengawasan KKP. Model ini memperkuat transparansi dan akuntabilitas pungutan negara. Selain itu, kebijakan ini berpotensi meningkatkan PNPB dari kapal skala menengah-besar, seiring dengan optimalisasi pemantauan hasil produksi kapal yang beroperasi di perairan luar.

Komposisi hasil tangkapan yang menjadi target utama terdiri dari beberapa ikan demersal yaitu biji nangka (*Upeneus tragula*), swangi (*Priacanthus tayenus*), kurisi (*Nemipterus nematophorus*), pasir-pasir (*Scolopsis bilineata*), kuniran (*Upeneus sulphureus*), coklatan (*Scolopsis affinis*), cumi-cumi (*Loligo spp.*), dan kapas-kapas (*Gerres filamentosus*). Hasil tangkapan di PPP Klidang Lor pada kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023 terjadi peningkatan total hasil tangkapan setiap tahunnya dengan jumlah produksi terbanyak pada tahun 2023 dengan total hasil tangkapan 16.041.158 Kg. Hasil produksi ikan hasil tangkapan dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2 Hasil produksi ikan hasil tangkapan tahun 2019-2023

Data komposisi hasil tangkapan di Pelabuhan Perikanan Pangkalan Klidang Lor menunjukkan bahwa perikanan di wilayah ini didominasi oleh spesies ikan demersal seperti swangi (*Priacanthus tayenus*) dan kurisi (*Nemipterus nematophorus*), serta spesies invertebrata seperti cumi-cumi (*Loligo spp.*) (Yonvitner *et al.* 2018; Zulkarnain *et al.* 2023). Dominasi spesies demersal ini menandakan bahwa aktivitas perikanan di Klidang Lor berfokus pada pemanfaatan sumber daya perairan dasar, yang

umumnya ditemukan di perairan dangkal dan menengah di sekitar pantai atau landas kontinen (Hasan *et al.* 2022).

Peningkatan hasil tangkapan secara konsisten dari 2019 hingga 2023, yang mencapai puncaknya sebesar 16.041.158 kg pada tahun 2023, mengindikasikan dua kemungkinan besar. Pertama, intensifikasi upaya penangkapan dapat menjadi salah satu penyebab utama dari peningkatan ini. Para nelayan di PPP Klidang Lor mungkin memperbesar frekuensi melaut, memanfaatkan alat tangkap yang lebih efisien seperti jaring tarik berkantong, serta memperluas area tangkapan mereka. Penggunaan alat tangkap yang efisien, seperti *purse seine*, telah terbukti meningkatkan produktivitas hasil tangkapan secara signifikan (Yusrizal *et al.* 2022).

Kedua, faktor produktivitas stok yang tinggi dan ketersediaan sumber daya ikan yang stabil juga bisa mempengaruhi angka tangkapan. Spesies ikan demersal, seperti biji nangka (*Upeneus tragula*) dan kurisi (*Nemipterus nematophorus*), dikenal memiliki siklus hidup yang pendek dan laju reproduksi yang cepat. Dalam studi oleh (Suman *et al.* 2017), dijelaskan bahwa spesies demersal di wilayah tertentu dapat mendukung stok ikan yang relatif berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Ketersediaan spesies tersebut di perairan dangkal dan menengah, ditambah dengan efektivitas penangkapan oleh nelayan, berkontribusi terhadap hasil tangkapan yang tinggi.

Tujuan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil, memperkuat kendali pengelolaan perikanan nasional, menciptakan keadilan sosial, dan meningkatkan ekonomi perikanan tangkap. Melalui pendekatan berkelanjutan dan inklusif, PIT diharapkan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat nelayan dan ekosistem perairan (Cahyarani *et al.* 2023). Penggunaan aplikasi e-PIT sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Nomor B. 1337/MEN-KP/XII/2022 tentang Penggunaan Aplikasi PIT secara elektronik, meliputi PNBP pungutan hasil perikanan pasca produksi melalui perhitungan mandiri (*self assessment*). e-PIT merupakan aplikasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, sehingga data yang di *input* oleh Nakhoda atau pemilik kapal dapat diakses oleh pengawas perikanan dan syahbandar untuk penerbitan Standard Laik Operasi (SLO), Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan (STBLK) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Dalam verifikasi penerbitan SPB agen atau pengurus kapal wajib membayar PNBP untuk kapal pasca produksi dan melampirkan bukti lunas pembayaran tambat labuh.

Untuk menerapkan PIT di PPP Klidang Lor nakhoda/pengurus harus melaporkan kedatangan kapal kepada syahbandar perikanan untuk mengatur waktu pembongkaran hasil tangkapan dengan pemeriksaan sebelumnya, mengeluarkan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK), dan mengeluarkan surat izin bongkar. Setelah mendapatkan izin rekomendasi bongkar dari Syahbandar Perikanan, hasil tangkapan akan dicatat oleh petugas pendataan menurut berat dan jenis ikan, sesuai dengan hasil penimbangan. Pendataan ikan harus dilakukan secara akurat dalam pungutan PNBP pasca produksi dalam penerapan PIT. Penarikan PNBP pasca produksi di PPP Klidang Lor dilakukan setelah ikan hasil tangkapan didaratkan dan dilakukan penimbangan. PNBP pasca produksi dalam PIT menjadi pendapatan yang diperoleh pemerintah pada kegiatan ekonomi sektor perikanan yang pelaksanaannya ditujukan untuk mewujudkan pengelolaan perikanan yang lebih baik dan berkelanjutan (Cahyarani *et al.* 2023).

Pada tahun 2024, ikan hasil tangkapan umumnya didominasi oleh jenis ikan demersal seperti biji nangka (*Upeneus tragula*), swanggi (*Priacanthus tayenus*), kurisi (*Nemipterus nematophorus*), pasir-pasir (*Scolopsis bilineata*), kuniran (*Upeneus sulphureus*), koklatan (*Scolopsis affinis*), cumi-cumi (*Loligo* spp.), dan kapas-kapas (*Gerres filamentosus*), sebagaimana tersaji dalam Tabel 2. Total hasil tangkapan pada bulan Januari sampai dengan bulan Mei berjumlah 5.291.066 Kg, dimana jumlah hasil tangkapan didominasi oleh jenis ikan biji nangka (*Upeneus moluccensis*) sebanyak 1.776.415 Kg, disusul jenis ikan swanggi (*Priacanthus tayenus*) sebanyak 1.054.861 Kg.

Tabel 2. Produksi hasil tangkapan PPP Klidang Lor Januari-Mei 2024

Jenis Ikan	Bulan					Total
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	
Biji nangka	361.787	432.440	493.835	154.143	334.210	1.776.415
Swanggi	207.642	213.860	282.885	77.899	272.575	1.054.861
Kuniran	208.536	203.710	194.515	52.359	157.470	816.590
Coklatan	181.852	200.250	216.655	42.778	192.300	833.835
Cumi	27.419	10.130	10.986	4.909	11.475	64.919
Kapas-kapas	99.365	101.930	267.260	87.396	188.495	744.446
Jumlah	1.086.601	1.162.320	1.466.136	419.484	1.156.525	5.291.066

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 2, hasil produksi tangkapan ikan di PPP Klidang Lor antara Januari hingga Mei 2024 menunjukkan tren penting dalam variasi produksi ikan setiap bulan. Total produksi selama periode tersebut mencapai 5.291.066 kg. Di antara berbagai jenis ikan, "biji nangka" memiliki jumlah produksi tertinggi, yaitu sebesar 1.776.415 kg, diikuti oleh "swanggi" dengan 1.054.861 kg, dan "kapas-kapas" sebanyak 744.446 kg. Sebaliknya, "cumi" menunjukkan produksi terendah, yaitu 64.919 kg. Variasi ini menunjukkan adanya perbedaan ketersediaan dan tingkat tangkapan spesies di wilayah tersebut. Melihat tren bulanan, produksi tertinggi terjadi pada Januari dengan total tangkapan mencapai 1.086.601 kg. "biji nangka" memberikan kontribusi yang signifikan dengan jumlah 361.787 kg, yang mengindikasikan kelimpahannya di awal tahun. Bulan Februari terjadi peningkatan produksi menjadi 1.162.320 kg, dengan "biji nangka" dan "swanggi" tetap menunjukkan tingkat produksi yang kuat. Produksi bulanan tertinggi tercatat pada Maret sebesar 1.466.136 kg, didorong oleh peningkatan tangkapan "biji nangka" (493.835 kg) dan "swanggi" (282.885 kg).

Hal ini menunjukkan kemungkinan kelimpahan musiman atau kondisi penangkapan yang optimal. Namun, pada April terjadi penurunan produksi yang signifikan, dengan total hanya 419.484 kg. Penurunan ini terjadi pada semua jenis ikan, khususnya "biji nangka" (154.143 kg), yang dapat disebabkan oleh perubahan lingkungan, regulasi penangkapan, atau berkurangnya upaya penangkapan. Pada bulan Mei, terjadi pemulihan sebagian dengan total produksi naik menjadi 1.156.525 kg. Meskipun demikian, tingkat produksi masih lebih rendah dibandingkan puncak produksi pada awal tahun, dengan "biji nangka" tetap menjadi jenis ikan dominan meskipun pada tingkat yang lebih rendah.

Tren di PPP Klidang Lor menunjukkan biji nangka (*Upeneus tragula*) konsisten mendominasi produksi pada awal tahun 2024, mencerminkan ketersediaan tinggi, laju reproduksi cepat, dan siklus hidup singkat yang menjaga stabilitas populasi (Fadly *et al.* 2023; Sari & Wibowo 2023). Swanggi (*Priacanthus tayenus*) juga stabil dengan puncak produksi pada Maret, kemungkinan dipengaruhi faktor musiman, suhu air, dan pakan (Yusrizal *et al.* 2022). Fluktuasi pasca-Maret menegaskan dinamika ini, sebagaimana dicatat oleh Sudrajat (2019) bahwa pola musiman mempengaruhi komposisi dan jumlah tangkapan. Sebaliknya, cumi-cumi (*Loligo* spp.) menunjukkan tangkapan rendah secara konsisten, yang mungkin disebabkan oleh populasi terbatas atau permintaan rendah (Baskoro *et al.* 2017; Sudrajat & Madyantoro 2022). Iskandar *et al.* 2020) menyoroti pentingnya lokasi dan teknik penangkapan, sementara (Yusfiandayani *et al.* 2024) merekomendasikan penggunaan atraktor cumi untuk meningkatkan hasil tangkapan. Fluktuasi produksi ini menunjukkan perlunya pengelolaan adaptif seperti penutupan musim atau kuota tangkapan guna menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan sumber daya, khususnya bagi spesies kunci seperti biji nangka dan swanggi.

PNBP Pasca Produksi di PPP Klidang Lor

Tabel 3 berikut menunjukkan data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pasca produksi di PPP Klidang Lor selama periode Maret hingga Desember 2023. Data mencakup jumlah kapal yang

beroperasi setiap bulan serta nilai PNBPN yang diperoleh, yang memberikan gambaran mengenai kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan negara selama periode tersebut.

Tabel 3. PNBPN pasca produksi PPP Klidang Lor Maret-Desember 2023

No	Bulan	Jumlah Kapal	Pembayaran PNBPN Pasca Produksi
1	Maret	7	33.147.230
2	April	7	33.857.440
3	Mei	1	8.292.600
4	Juni	7	48.324.705
5	Juli	6	44.125.590
6	Agustus	8	58.100.535
7	September	4	22.261.815
8	Oktober	24	244.827.165
9	November	27	219.548.775
10	Desember	35	341.467.740
Jumlah			1.053.953.595

PNBPN pasca produksi di PPP Klidang Lor meningkat signifikan antara Maret-Desember 2023, total mencapai Rp1.053.953.595, didorong oleh migrasi kapal <30 GT yang wajib mengantongi izin pusat untuk beroperasi di atas 12 mil laut (Christiawan 2021). Kebijakan ini menunjukkan pengaturan perizinan yang lebih ketat demi menjaga legalitas usaha. Pada bulan Maret tercatat 7 kapal dengan PNBPN Rp33.147.230, naik di April, namun turun drastis pada Mei dengan hanya satu kapal dan Rp8.292.600. Data menunjukkan fluktuasi jumlah kapal dan nilai PNBPN bulanan yang dapat dipengaruhi cuaca dan regulasi (Wijaya *et al.* 2021).

Studi mendukung penerapan *Online Single Submission* untuk mempercepat perizinan dan meningkatkan kontribusi PNBPN (Christiawan 2021). Penguatan pengawasan juga penting untuk mengatasi temuan BPK dan meningkatkan kepatuhan sektor perikanan (Dinarjito 2017; Rulandari & Alvin 2023). Kombinasi perizinan *online* dan pengawasan yang kuat berperan dalam menjaga keberlanjutan pendapatan PNBPN di PPP Klidang Lor. Penyuluhan hukum dan edukasi izin usaha turut diperlukan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal (Andriani 2022).

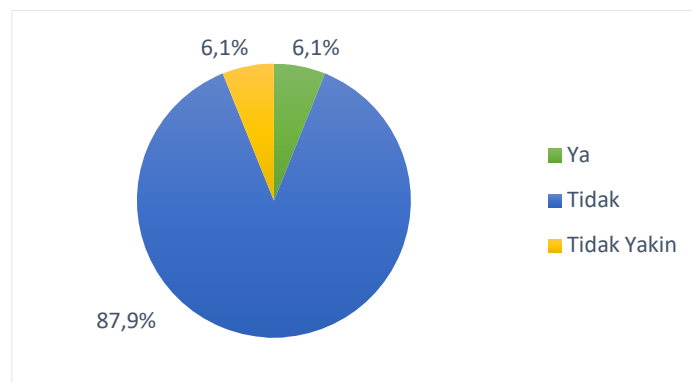
Pada bulan Juni terdapat 7 kapal dengan PNBPN Rp48.324.705, meningkat pada Juli dan Agustus menjadi 6 dan 8 kapal dengan PNBPN Rp 44.125.590 dan Rp58.100.535. Fluktuasi PNBPN pasca produksi di PPP Klidang Lor selama Juni-Desember 2023 mencerminkan dinamika penangkapan dan hasil yang bervariasi, menunjukkan pola musiman terkait ketersediaan ikan (Girardin *et al.* 2016; Picaulima *et al.* 2022; Purwanti 2023). Puncak PNBPN terjadi Oktober, dengan 24 kapal menghasilkan Rp244.827.165, mengindikasikan musim puncak penangkapan (Ikhsan *et al.* 2023; Oken *et al.* 2021). Namun, meski kapal meningkat di November (27 kapal) dan Desember (35 kapal), PNBPN tidak melampaui Oktober, masing-masing Rp219.548.775 dan Rp341.467.740. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kapal tidak selalu berbanding lurus dengan nilai PNBPN yang dipengaruhi jenis ikan, hasil per kapal, dan harga pasar (Ayers & Chan 2020; Limbong *et al.* 2018; Nelwan *et al.* 2017a; Nurani *et al.* 2021). Penelitian menunjukkan bahwa komposisi hasil tangkapan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan nelayan (Ayal *et al.* 2021; Nelwan *et al.*, 2017b; Picaulima *et al.* 2021). Selain itu, fluktuasi ini juga mencerminkan pengaruh kondisi pasar dan regulasi yang menciptakan ketidakpastian pendapatan (Amri & Prasetyo 2017; Fuatkait *et al.* 2022). Oleh sebab itu, pengelolaan yang adaptif dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan dan produktivitas perikanan di PPP Klidang Lor.

Data ini menunjukkan dinamika PNBPN pasca produksi yang dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan, jumlah kapal dan aktivitas penangkapan. (Putra *et al.* 2023) menegaskan bahwa kepatuhan terhadap regulasi berkontribusi pada peningkatan PNBPN dan kelestarian lingkungan. Sedangkan aktivitas penangkapan dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti Covid-19 yang pernah terjadi

pada tahun 2020-2021. Djunaidi *et al.* (2023) mencatat bahwa pandemi COVID-19 menurunkan aktivitas penangkapan dan hasil tangkapan di Dumai (Djunaidi *et al.* 2023). Aktivitas penangkapan juga dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. (Pratiwi *et al.* 2019) menyoroti bahwa penurunan hasil tangkapan di Selat Sunda dipicu perubahan suhu laut dan faktor lingkungan lainnya.

Untuk pengelolaan perikanan yang lebih optimal, perlu adanya pemantauan rutin terhadap faktor-faktor ini serta penyesuaian kebijakan terkait perizinan dan kuota penangkapan. Optimalisasi PNBP bergantung pada pengelolaan efisien dan penerapan teknologi untuk memantau penangkapan dan mencegah pelanggaran (Tawaqal *et al.* 2020). (Ayubi *et al.* 2023) juga menekankan pentingnya strategi penangkapan dan adaptasi kebijakan berbasis data wilayah. Pengelolaan yang adaptif dan berbasis data diharapkan dapat meningkatkan penerimaan PNBP secara berkelanjutan, sekaligus menjaga kelestarian sumber daya perikanan di wilayah PPP Klidang Lor.

Laporan Perhitungan Mandiri (LPM) dalam penangkapan ikan terukur adalah suatu tahapan yang dilakukan oleh pelaku usaha perikanan untuk mengisi laporan perhitungan mandiri terhadap SIUP, SIPI, SIKPI, serta operasional kapal penangkapan ikan sepanjang tahun ini. Hal ini menciptakan transparansi di industri perikanan yang, pada gilirannya, berkontribusi terhadap pengelolaan sumber daya perikanan yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab (Wibisono & Pandamdari 2020). LPM ini merupakan laporan yang dibuat oleh pelaku usaha perikanan atau nelayan sebagai bentuk pelaporan mandiri atas hasil tangkapan ikan mereka. Tujuan utama dari LPM adalah untuk memantau dan memastikan bahwa kegiatan penangkapan ikan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan batasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, guna menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan.

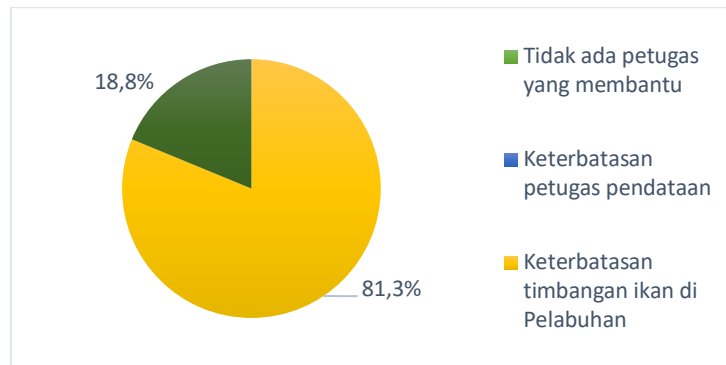


Gambar 3 Tingkat kesulitan nelayan Klidang Lor dalam pembayaran LPM

Gambar 3 menunjukkan bahwa mayoritas nelayan, sekitar 87,9%, tidak mengalami kesulitan dalam pengisian LPM, sedangkan 6,1% merasa tidak yakin dan sebagian kecil mengalami kesulitan. Sikap positif ini mencerminkan adaptasi yang baik oleh nelayan terhadap regulasi yang ada, meski masih ada beberapa individu yang kesulitan dalam proses tersebut. Ada beberapa pengurus kapal yang masih mengalami kesulitan karena mereka kurang beradaptasi dan baru mengetahui tentang regulasi ini. Bantuan dan pelatihan sangat lah penting untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih baik mengenai sistem pelaporan ini, sehingga seluruh pelaku usaha perikanan dapat mengikuti peraturan yang ada dengan lebih efektif (Effendy *et al.* 2024). Selain itu, penguatan kapasitas melalui pelatihan dan sosialisasi terkait pengisian laporan harus terus dilakukan untuk mengurangi kesulitan yang dihadapi oleh beberapa nelayan dan pengurus kapal (Syahrir *et al.* 2023).

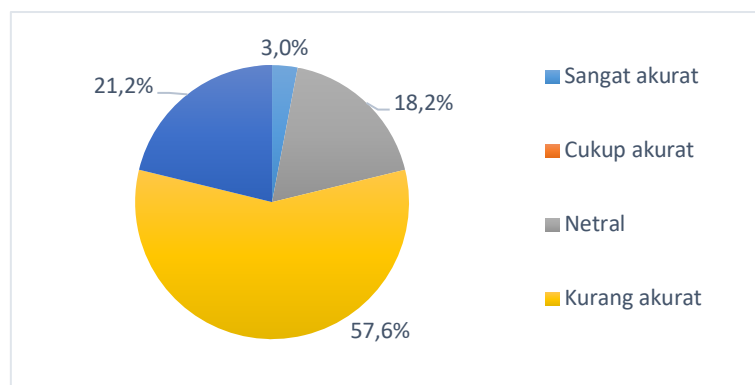
Penggunaan teknologi dalam menyusun LPM dapat mempermudah proses pencatatan dan pelaporan (Mustaruddin *et al.* 2021). Sistem pengelolaan terintegrasi yang baik akan menghasilkan data yang lebih akurat, yang sangat penting dalam penanganan dan pengelolaan sumber daya perikanan, serta akan mempermudah pihak berwenang dalam melakukan regulasi (Muhammad *et al.* 2019). Dengan pendekatan yang berbasis data, serta pemantauan dan evaluasi yang efektif, keberlanjutan

sumber daya perikanan dapat terjaga, dan penerimaan negara melalui PNBP dari sektor perikanan dapat meningkat secara signifikan (Ridwansyah *et al.* 2024).



Gambar 4 Kendala nelayan saat pengisian LPM

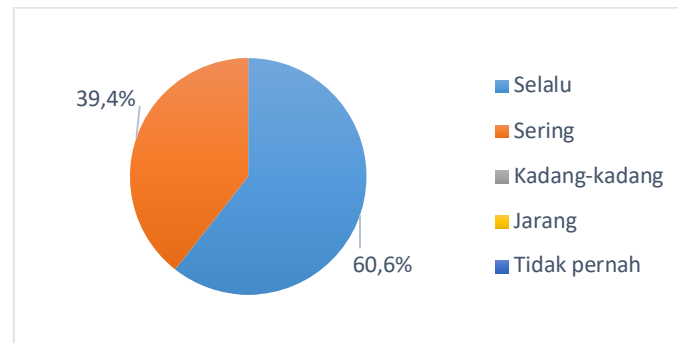
Ada beberapa kendala terkait pelaporan saat melakukan penghitungan mandiri. Sebanyak 26 nelayan (81,3%) mengalami kendala pelaporan akibat keterbatasan timbangan; hanya dua dari lima timbangan yang berfungsi karena kurangnya petugas. Kondisi ini berpotensi menyebabkan ketidakakuratan data tangkapan, sejalan dengan temuan bahwa infrastruktur yang minim, seperti fasilitas timbangan, menghambat pelaporan efektif (Rubianti *et al.* 2023; Sianturi *et al.* 2022). Oleh karena itu, peningkatan SDM dan fasilitas di pelabuhan menjadi penting (Nasution & Ramadhini 2024). Selain itu, kendala juga muncul dari kurangnya pemahaman nelayan tentang prosedur pelaporan, sehingga dibutuhkan pelatihan dan pendampingan lebih lanjut (Arodhiskara *et al.* 2022). Penerapan teknologi informasi juga direkomendasikan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi (Nurani *et al.* 2023). Solusi ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas pelaporan LPM di lapangan. Kendala lain yang dihadapi adalah nelayan masih belum memahami cara melaporkan penghitungan mandiri. Data terkait kendala dalam pelaporan ini dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 5 Tanggapan nelayan terhadap akurasi pengisian LPM

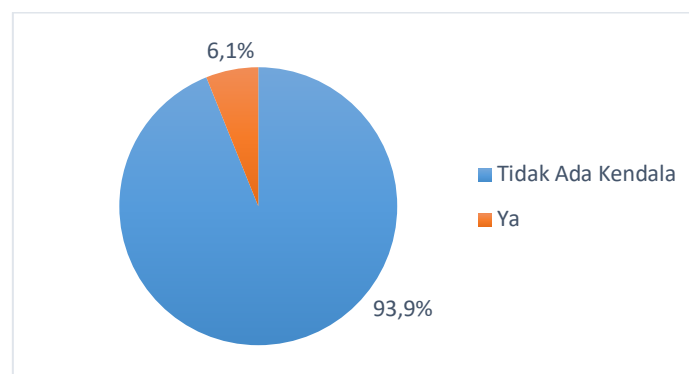
Gambar 5 menunjukkan tanggapan nelayan mengenai tingkat akurasi pengisian Laporan Perhitungan Mandiri (LPM). Sebanyak 33 nelayan memberikan tanggapan yang berbeda-beda, di mana 57,6% (19 nelayan) menyatakan kurang akurat, 21,2% (7 nelayan) menyatakan tidak akurat sama sekali, 18,2% (6 nelayan) bersikap netral, dan hanya 3% (1 nelayan) yang menyatakan sangat akurat. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa rata-rata tanggapan nelayan mengenai tingkat akurasi pengisian LPM adalah tidak akurat. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pasca produksi harus dibayar secara tepat waktu oleh pelaku usaha perikanan. Pelaku usaha perikanan wajib membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pasca produksi sebelum melakukan usaha penangkapan ikan untuk setahun ke depan. Mekanisme ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif PNBP Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan data nelayan, sebanyak 60,6% atau 20 nelayan menjawab bahwa mereka selalu membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pasca produksi tepat waktu, sedangkan 39,4% atau 13 nelayan menjawab sering membayar tepat waktu. Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa 33 nelayan cenderung membayar PNBP pasca produksi tepat waktu. Jika nelayan tidak membayar PNBP tepat waktu, menurut salah satu pengurus yang diwawancarai, mereka akan dikenakan sanksi, seperti tidak diterbitkannya SPB dan SLO, serta akun PIT akan dibekukan (Gambar 6).



Gambar 6 Ketepatan nelayan membayar PNBP pasca produksi

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pasca produksi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap hasil produksi di sektor perikanan sebagai bagian dari kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke, kenaikan biaya operasional dan penetapan PNBP pasca produksi berdasarkan ukuran kapal memiliki dampak pada pendapatan nelayan. Sebagai contoh, kapal dengan ukuran 28-30 GT dikenakan PNBP sebesar 5% dari hasil produksinya, sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 38 Tahun 2021 (Idris *et al.* 2024; Khairisa & Pertiwi 2024). Penerapan PNBP pasca produksi ini bertujuan untuk menciptakan keadilan ekonomi dan menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, Padang, PNBP pasca produksi diterapkan dengan mekanisme pencatatan data tangkapan ikan menggunakan metode yang lebih terorganisir (Husni 2024). Meskipun sempat ada kekhawatiran dari pemilik kapal dan nelayan terkait pungutan ini, PNBP pasca produksi dinilai lebih adil karena didasarkan pada volume hasil tangkapan aktual setelah produksi (Cahyarani *et al.* 2023).



Gambar 7 Kendala nelayan dalam pembayaran PNBP pasca produksi

Hasil penelitian yang ditunjukkan pada Gambar 7 mengindikasikan bahwa mayoritas nelayan, yaitu 93,9%, tidak mengalami kendala dalam pembayaran PNBP pasca produksi penangkapan ikan. Temuan ini mencerminkan bahwa sistem pembayaran PNBP yang diterapkan saat ini sudah cukup efektif dan efisien, sehingga sebagian besar nelayan dapat memenuhi kewajiban pembayaran mereka tanpa hambatan. Efektivitas ini dapat disebabkan oleh prosedur pembayaran yang jelas, layanan administrasi yang baik, atau tingkat pemahaman nelayan mengenai kewajiban PNBP. Namun, penting untuk dicatat bahwa masih ada 6,1% nelayan yang melaporkan kesulitan dalam pembayaran PNBP. Meskipun jumlah ini relatif kecil, keberadaannya menunjukkan adanya celah dalam sistem

pembayaran yang perlu ditangani. Kendala yang dialami oleh kelompok kecil nelayan ini perlu ditelusuri lebih lanjut, apakah terkait masalah teknis, administratif, atau finansial. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diharapkan sistem pembayaran PNBP dapat disempurnakan dan lebih inklusif, sehingga seluruh nelayan dapat menjalankan kewajiban mereka tanpa kesulitan. Penyempurnaan ini juga akan berkontribusi pada kelancaran proses pengelolaan PNBP secara keseluruhan dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam sektor perikanan.

Rendahnya pemahaman nelayan tentang pentingnya membayar PNBP menjadi tantangan utama dalam pengelolaannya (Dinarjito 2017). Kurangnya sosialisasi terkait proses dan sanksi keterlambatan turut memengaruhi kepatuhan nelayan. Sosialisasi dan evaluasi regulasi PNBP penting untuk meningkatkan pendapatan negara (Allagan *et al.* 2023). Pelatihan dan penyuluhan diharapkan dapat memperkuat kepatuhan nelayan terhadap kewajiban PNBP. Teknologi dapat memberdayakan nelayan dalam memahami dan melaksanakan kewajiban PNBP secara efektif (Mahmuddin *et al.* 2019). Oleh karena itu, integrasi antara edukasi, teknologi, dan penguatan regulasi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan mendukung keberlanjutan pengelolaan perikanan.

Persepsi nelayan terhadap kebijakan PIT bervariasi. Nelayan di Sorong Manoi memandang PIT positif karena menjaga keberlanjutan dan mengurangi konflik antar nelayan, meskipun ada kekhawatiran dampak ekonomi jangka pendek dan kurangnya sosialisasi (Rusmilyansari & Mahreda 2019). Sebaliknya, nelayan di Pantura Jawa menilai PIT lebih menguntungkan industri besar dan merugikan nelayan kecil, memicu ketidakpuasan dan potensi konflik (Idawijayanti & Pramono 2021; Karisma *et al.* 2019). Keberhasilan implementasi PIT juga sangat bergantung pada partisipasi nelayan dalam proses kebijakan (Sari & Satria 2015). Perbedaan persepsi ini mencerminkan kompleksitas relasi nelayan dan kebijakan, sehingga pendekatan yang inklusif dan kolaboratif menjadi kunci untuk keberhasilan PIT di lapangan. Sosialisasi dan pendampingan intensif diperlukan untuk meningkatkan pemahaman nelayan dan mengurangi resistensi. Pelatihan dan dialog antara pemerintah dan nelayan direkomendasikan untuk menjembatani kesenjangan ini (Zulaika *et al.* 2024). Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan komunikasi yang lebih baik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berbasis pada pemahaman dan kebutuhan nelayan, guna menciptakan persepsi yang lebih selaras antara pemerintah dan para pelaku perikanan (Gerungan *et al.* 2024; Poltak *et al.* 2024).

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan migrasi izin usaha telah berjalan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023. Meski sebagian besar nelayan mampu melaksanakan pelaporan LPM dan pembayaran PNBP secara lancar, masih terdapat kendala utama berupa keterbatasan alat timbang dan pemahaman teknis. Temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas nelayan serta perbaikan infrastruktur pendukung di pelabuhan. Selain itu, tren peningkatan PNBP pasca produksi sejak Maret 2023 mencerminkan perbaikan tata kelola dan potensi optimalisasi penerimaan negara dari sektor perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alem, M. B. (2024). Queuing Analysis and Optimization of Public Vehicle Transport Stations: A Case of South West Ethiopia Region Vehicle Stations. *International Journal of Industrial Optimization*, 31–44. <https://doi.org/10.12928/ijio.v5i1.7963>
- Aliza, A. N., & Pandamdari, E. (2022). Tinjauan Yuridis Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap Oleh Nelayan Di Pelabuhan Karangantu. *Reformasi Hukum Trisakti*, 4(2), 303–312. <https://doi.org/10.25105/refor.v4i2.13604>

- Allagan, H. Br., Suharto, S., & Yogopriyatno, J. (2023). Analisis Implementasi Sewa Barang Milik Negara Dalam Peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak. *Pesirah Jurnal Administrasi Publik*, 3(2). <https://doi.org/10.47753/pjap.v3i2.46>
- Amri, K., & Prasetyo, D. (2017). Pengelolaan Suaka Perikanan Danau Bakuok Kabupaten Kampar Riau. *Bawal Widya Riset Perikanan Tangkap*, 2(3), 107. <https://doi.org/10.15578/bawal.2.3.2008.107-112>
- Andriani, C. (2022). Pemberdayaan Umkm Dengan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha Melalui Oss Di Kelurahan Krembangan Selatan Surabaya. *Patikala Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 406–413. <https://doi.org/10.51574/patikala.v2i1.487>
- Aprilia. (2023). Implementasi Konsep Blue Economy Di Indonesia Sebagai Upaya Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) 14: Life Below Water. *Jurnal Ilmiah Samudra Akuatika*, 7(2), 40–48. <https://doi.org/10.33059/jisa.v7i2.9116>
- Arkan, M. F., & Rosdiana, H. (2024). Evaluasi Kebijakan Pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pasca Produksi: Studi Pembangunan Sektor Perikanan Tangkap Berbasis Blue Economy Di Indonesia. 1(2), 84–94. <https://doi.org/10.61511/ersud.v1i2.2024.1190>
- Arkham, M. N., Kelana, P. P., Pramesthy, T. D., Djunaidi, Roza, S. Y., & Ikhsan, S. A. (2021). Status Pemanfaatan Sumberdaya Ikan Demersal Di Dumai, Riau. *ALBACORE*, 5(3), 235–242.
- Arodhiskara, Y., Ladung, F., Jumriani, J., & Suherman, S. (2022). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Sak Etap Pada Umkm Binaan Dinas Pertanian, Kelautan, Dan Perikanan Kota Parepare. *Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 6(02). <https://doi.org/10.22219/skie.v6i02.21686>
- Ayal, F. W., Abrahamsz, J., & Pentury, R. (2021). Identifikasi Aktivitas Perikanan Merusak Di Teluk Sawai. *Triton Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan*, 17(2), 125–134. <https://doi.org/10.30598/tritonvol17issue2page125-134>
- Ayers, A. L., & Chan, H. L. (2020). Rights-Based Management, Competition, and Distributional Equity in Hawai'i's Largest Commercial Fishery. *International Journal of the Commons*, 14(1), 262–277. <https://doi.org/10.5334/ijc.996>
- Ayubi, A. Al, Liufeto, F. Ch., Sari, K., Yahyah, Y., & Santoso, P. (2023). Studi Penangkapan Tuna Oleh Nelayan Di Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata. *Jurnal Vokasi Ilmu-Ilmu Perikanan (Jvip)*, 3(2), 52. <https://doi.org/10.35726/jvip.v3i2.5375>
- Baskoro, M. S., Sondita, M. F. A., Yusfiandayani, R., & Syari, I. A. (2017). Efektivitas Bentuk Atraktor Cumi-Cumi Sebagai Media Penempelan Telur Cumi-Cumi (*Loligo Sp.*). *Jurnal Kelautan Nasional*, 10(3), 177. <https://doi.org/10.15578/jkn.v10i3.6191>
- Cahyarani, A., Susanto, A., & Asep Hamzah. (2023). Perceptions of Fishing Vessel Owners Based at Ocean Fishing Poft of Nizam Zachman Jakarta Regarding the Implementation of Measurable Fisheries Policies. *Jurnal Agribisnis Perikanan*, 16(2), 106–111. <https://doi.org/10.52046/agrikan.v16i2.106-111>
- Campbell, S., Greenwood, M., Prior, S., Shearer, T., Walkem, K., Young, S., Bywaters, D., & Walker, K. (2020). Purposive Sampling: Complex or Simple? Research Case Examples. *Journal of Research in Nursing*, 25(8), 652–661. <https://doi.org/10.1177/1744987120927206>
- Christiawan, R. (2021). Perizinan Berbasis Online Single Submission Untuk Mewujudkan Kemudahan Berusaha. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(1), 60–69. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.60-69>
- Deswati, R. H., Muliawa, I., Yusuf, R., & Apriliani, T. (2021). Persepsi Terhadap Kebijakan Pemberlakuan Kembali Izin Kapal Ikan Buatan Luar Negeri Di Perairan Indonesia. *Jurnal*

- Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan, 11(1), 51.
<https://doi.org/10.15578/jksekp.v11i1.9493>
- Dinarjito, A. (2017). Analisis Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga. *Info Artha*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.31092/jia.v1i1.5>
- Djunaidi, Arkham, M. N., Ikhsan, S. A., & Amrullah, Mohd. Y. (2023). Persepsi Dan Produksi Hasil Tangkapan Nelayan Skala Kecil Di Kota Dumai Provinsi Riau Pada Saat Pandemi Covid-19. *Albacore Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, 6(2), 165–172. <https://doi.org/10.29244/core.6.2.165-172>
- Effendy, L., Isnaini, Z., & Isnawati, I. (2024). Pelatihan Design Grafis Dan Pengelolaan Keuangan Pada Usaha Sablon Di Desa Santong. *Jurnal Abdimas Independen*, 5(2), 150–157. <https://doi.org/10.29303/independen.v5i2.1312>
- Fadly, Z. R., Sitepu, S. Tr. Pi. M. H., Hermawan, F., Azis, Muh. A., & Alamsyah, S. (2023). Keragaan Perikanan Cantrang (Studi Kasus Di PPN Brondong). 1(2), 55–63. <https://doi.org/10.25181/marshela.v1i2.3025>
- Fuatkait, D. S., Matrutty, D. D. P., & Waileruny, W. (2022). Analisis Hasil Tangkapan Ikan Tuna Madidihang Berdasarkan Musim Di Perairan Kepulauan Tanimbar. *Triton Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan*, 18(2), 84–94. <https://doi.org/10.30598/tritonvol18issue2page84-94>
- Gerungan, K. K. I., Darmastuti, R., & Kristiyani, D. N. (2024). Strategi Komunikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Mensosialisasikan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (Studi Kasus Nelayan Kota Tegal). *Scriptura*, 14(1), 1–13. <https://doi.org/10.9744/scriptura.14.1.1-13>
- Girardin, R., Hamon, K. G., Pinnegar, J. K., Poos, J. J., Thébaud, O., Tidd, A., Vermard, Y., & Marchal, P. (2016). Thirty Years of Fleet Dynamics Modelling Using Discrete-choice Models: What Have We Learned? *Fish and Fisheries*, 18(4), 638–655. <https://doi.org/10.1111/faf.12194>
- Haerisma, A. S. (2024). The Influence of Marketing Communication and Service Quality on Customer Decisions at BJB Syariah KCP Sumber Cirebon. *El-Qish Journal of Islamic Economics*, 4(1). <https://doi.org/10.33830/elqish.v4i1.8019.2024>
- Hasan, R., Tadjuddah, M., & Asriyana, A. (2022). Sistem Pengelolaan Perikanan Demersal Di Karang Kapota Taman Nasional Wakatobi. *Jsipi (Jurnal Sains Dan Inovasi Perikanan) (Journal of Fishery Science and Innovation)*, 6(2), 66–80. <https://doi.org/10.33772/jsipi.v6i2.15>
- Hermawan, M., & Nurlaela, E. (2023). Penurunan Produktivitas Purse Seine Di Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Baai Bengkulu. *Jurnal Kelautan Dan Perikanan Terapan (JKPT)*, 1, 111. <https://doi.org/10.15578/jkpt.v1i0.12104>
- Husni, Q. Y. (2024). Analisis Pencatatan Data Hasil Tangkapan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Kota Padang. Universitas Bung Hatta.
- Hutajulu, J., Annur, M. Y., Nugraha, E., Mualim, R., Hermawan, M., Kusumo, T., Dewi, P., Nurlaela, E., & Putra, G. N. (2023). Study on Katsuwonus pelamis fishing business at Sadeng Fishery Port, Yogyakarta, Indonesia. *AACL Bioflux*, 16(1), 328–341. <http://www.bioflux.com.ro/aac1>
- Idawijayanti, T., & Pramono, R. W. D. (2021). Pengadaan Tanah Jalur Kereta Api Bandara Adi Soemarmo-Solo Balapan: Kebijakan Konservasi vs Pembangunan Infrastruktur. *Bhumi Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 7(2), 163–180. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i2.484>
- Idris, M. T., Sahri Baruadi, A. R., & Tuli, M. (2024). Manajemen Usaha Perikanan Tangkap Ikan Cakalang Dengan Pole And Line. *Jurnal Ilmiah Perikanan Dan Kelautan*, 11(2).

- Ikhsan, S. A., Mardiah, R. S., Hutapea, R. Y. F., Sari, R. P., Haris, R. B. K., & Tiku, M. (2023). Potret Perikanan Tangkap Kota Dumai Sejak 2017 Hingga 2021. *Jurnal Teknologi Perikanan Dan Kelautan*, 14(1), 65–71. <https://doi.org/10.24319/jtpk.14.65-71>
- Iskandar, M. D., Hariwisudo, S., Iskandar, B. H., & Baskoro, M. S. (2020). Komposisi Dan Distribusi Ukuran Hasil Tangkapan Sampingan Bubu Ekor Kuning Di Perairan Kepulauan Seribu. *Depik*, 9(3), 516–524. <https://doi.org/10.13170/depik.9.3.18580>
- Karim, M. (2020). Evaluasi Dan Implikasi Kebijakan Pemberantasan Kejahatan Perikanan Di Indonesia 2014-2018. *Akuatika Indonesia*, 5(1), 40. <https://doi.org/10.24198/jaki.v5i1.26453>
- Karisma, P., Fatmariza, F., Fatimah, S., & Ikhsan, R. (2019). Konflik Alat Tangkap Ikan Di Desa Teluk Pambang Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 3(2), 98. <https://doi.org/10.17977/um021v3i2p98-109>
- Kenedi, J. (2024). Capabilities, Knowledge and Skills of Superior Human Resources Through the Competency of Tanjung Balai Karimun Port Employees, Riau Islands, Indonesia. *Environment and Social Psychology*, 9(5). <https://doi.org/10.54517/esp.v9i5.1749>
- Khairisa, M. A., & Pertiwi, P. R. (2024). Analisis Aspek Keuangan Dan Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Sektor Perikanan Tangkap Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke, Jakarta Utara. *AgriDev*, 2(1), 31–40. <https://doi.org/10.33830/agridev.v2i1.4760.2023>
- Kusdiantoro, K., Fahrudin, A., Wisudo, S. H., & Juanda, B. (2019). Perikanan Tangkap Di Indonesia: Potret Dan Tantangan Keberlanjutannya. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 14(2), 145. <https://doi.org/10.15578/jsekp.v14i2.8056>
- Kusumaningrum, A., Lumingas, L. L., Sumilat, D. A., Budiman, J., Luasunaung, A., & Warouw, V. (2021). Analysis of Leading Commodities From Capture Fisheries Resources at Bitung Oceanic Fishing Port, North Sulawesi. *Aquatic Science & Management*, 9(2). <https://doi.org/10.35800/jasm.v9i2.35130>
- Limbong, I., Wiyono, E. S., & Yusfiandayani, R. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Produksi Unit Penangkapan Pukat Cincin Di PPN Sibolga, Sumatera Utara. *Albacore Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, 1(1), 89–97. <https://doi.org/10.29244/core.1.1.89-97>
- Mahmuddin, F., Klara, S., Hamzah, H., Amin, S., Setiawan, I., Amiruddin, A. A., & Hasbullah, M. (2019). Bimbingan Aplikasi Sistem Hibrid Genset Dan Photovoltaic Pada Masyarakat Nelayan Di Suppa Kabupaten Pinrang. *Jurnal Tepat Applied Technology Journal for Community Engagement and Services*, 2(2), 7–16. https://doi.org/10.25042/jurnal_tepat.v2i2.71
- Marpaung, B. S. M., Sitanggang, E. P., Masengi, K. W. A., Kaparang, F. E., Pamikiran, R. D. Ch., Sitanggang, D. F. D., & Kalalo, F. F. (2022). Pelanggaran Kapal Perikanan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 571. *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Perikanan Tangkap*, 7(2), 141. <https://doi.org/10.35800/jitpt.7.2.2022.41608>
- Marpaung, M., Harahap, I., & Syarvina, W. (2023). Valuasi Ekonomi Pada Wisata Pantai Pondok Permai Dengan Travel Cost Model Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(6), 3612–3627. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.3753>
- Muhammad, S., Mallawa, A., & Zainuddin, M. (2019). Analisis Daerah Penangkapan Dan Pola Pergerakan Ikan Terbang Di Perairan Utara Majene. *Jurnal Ipteks Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan*, 5(9). <https://doi.org/10.20956/jipsp.v5i9.6186>
- Mustaruddin, M., Asnil, A., & Nugraha, A. (2021). Sistem Informasi Perikanan Tangkap D.I. Yogyakarta: Pengembangan Basis Data Lingkungan, Produksi, Dan Sistem Keputusan Penangkapan Ikan. *Albacore Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, 4(1), 097–107. <https://doi.org/10.29244/core.4.1.097-107>

- Mustaruddin, Puspito, G., Baskoro, M. S., & Wisudo, S. H. (2024). Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Dan Pengembangan Lembaga Kemitraannya Di Desa Citemu, Cirebon. *ALBACORE*, 8(2), 121–129.
- Nasution, J., & Ramadhini, S. (2024). Analisis Pemotongan Dan Pemungutan Laporan Pajak Di Dinas Kelautan Dan Perikanan Sumatera Utara. *Ekoma Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi*, 4(1), 2617–2621. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i1.6117>
- Nelwan, A., Sondita, M. F. A., Monintja, D. R., & Simbolon, D. (2017a). Analisis Upaya Penangkapan Ikan Pelagis Kecil Di Selat Makassar, Perairan Pantai Barat Sulawesi Selatan. *Jurnal Teknologi Perikanan Dan Kelautan*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.24319/jtpk.1.1-14>
- Nelwan, A., Sondita, M. F. A., Monintja, D. R., & Simbolon, D. (2017b). Evaluasi Produksi Perikanan Tangkap Pelagis Kecil Di Perairan Pantai Barat Sulawesi Selatan. *Jurnal Teknologi Perikanan Dan Kelautan*, 1(1), 41–49. <https://doi.org/10.24319/jtpk.1.41-49>
- Nurani, T. W., Oktariza, W., Taryono, T., Trilaksani, W., Adrianto, L., Ahmad, M., Muawanah, U., & Pratama, C. D. (2021). Strategi Percepatan Fungsionalisasi Sentra Kelautan Perikanan Terpadu Natuna. *Marine Fisheries Journal of Marine Fisheries Technology and Management*, 11(2), 147–160. <https://doi.org/10.29244/jmf.v11i2.36278>
- Nurani, T. W., Wahyuningrum, P. I., Hapsari, R. D., Khoerunnisa, N., Wiyono, E. S., Solihin, I., Iskandar, M. D., & Wisudo, S. H. (2023). Strategi Peningkatan Aktivitas Perikanan Tangkap Di Kabupaten Kebumen. *Marine Fisheries Journal of Marine Fisheries Technology and Management*, 14(2), 211–224. <https://doi.org/10.29244/jmf.v14i2.45008>
- Nurlaela, E. (2023). Penangkapan Ikan Terukur : Tantangan dan Penerapan. In *Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut Berkelanjutan* (pp. 267–313).
- Nurlaili, N., Muhartono, R., & Hikmayani, Y. (2016). Dampak Kebijakan Moratorium Terhadap Sektor Usaha Perikanan Tangkap Di Kota Bitung. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 6(2), 145. <https://doi.org/10.15578/jksekp.v6i2.3327>
- Oken, K. L., Holland, D. S., & Punt, A. E. (2021). The Effects of Population Synchrony, Life History, and Access Constraints on Benefits From Fishing Portfolios. *Ecological Applications*, 31(4). <https://doi.org/10.1002/eap.2307>
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2013). Purposeful Sampling for Qualitative Data Collection and Analysis in Mixed Method Implementation Research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>
- Picaulima, S. M., Wiyono, E. S., Baskoro, M. S., & Riyanto, M. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Tangkapan Armada Perikanan Skala Kecil Di Kei Kecil Bagian Timur , Kepulauan Kei. *Jurnal Sumberdaya Akuatik Indopasifik*, 5(4), 415. <https://doi.org/10.46252/jsai-fpik-unipa.2021.vol.5.no.4.189>
- Picaulima, S. M., Wiyono, E. S., Ngamel, A. K., Pentury, F., & Ngangun, T. A. (2022). Analisis Usaha Perikanan Purse Seine Skala Kecil Tipe Satu Dan Dua Kapal Dalam Zona Penangkapan Ikan Terukur Di WPP-NRI 714 Dan 718, Kepulauan Kei. *Jurnal Sumberdaya Akuatik Indopasifik*, 6(2), 89–102. <https://doi.org/10.46252/jsai-fpik-unipa.2022.vol.6.no.2.224>
- Poltak, H., Heintje Ndahwali, D., Gunaisah, E., Cristian Karubaba, O., & Adi Purnomo. (2024). Persepsi Nelayan Terhadap Penangkapan Ikan Terukur Ditinjau Dari Aspek Sosial, Ekonomi, Dan Lingkungan. *Jurnal Sosial Ekonomi Perikanan*, 9(3), 249–263. <https://doi.org/10.33772/jsep.v9i3.105>

- Pratiwi, D. M., Yonvitner, Y., & Fahrudin, A. (2019). Risiko Populasi Sumberdaya Ikan Di Perairan Selat Sunda. *Tropical Fisheries Management Journal*, 3(1), 51–57. <https://doi.org/10.29244/jppt.v3i1.30174>
- Purwanti, P. (2023). Perilaku Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Purse Seine Dan Tingkat Kesejahteraannya Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. *JFMR-Journal of Fisheries and Marine Research*, 7(1). <https://doi.org/10.21776/ub.jfmr.2023.007.01.8>
- Putra, T. R., Noviyanti, R., & Gigentika, S. (2023). Kepatuhan Armada Purse Seine Terhadap Regulasi Penangkapan Ikan Di PPS Belawan, Sumatera Utara. *Albacore Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, 7(1), 175–188. <https://doi.org/10.29244/core.7.1.175-188>
- Putra, T. S. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Perikanan Budidaya Di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 1643–1654. <https://doi.org/10.26740/publika.v11n1.p1643-1654>
- Rahmayanti, A. Z., Cahyono, B. D., & Nadjib, M. (2017). Implikasi Kebijakan Moratorium Terhadap Sektor Perikanan Di Bitung. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 25(1), 1. <https://doi.org/10.14203/jep.25.1.2017.1-14>
- Ridwansyah, M., Desmaryani, S., Irmanelly, I., Musnaini, M., Suman, A., & Fazri, A. (2024). Identifikasi Dan Strategi Pengembangan Potensi Sub Sektor Perikanan Pada Kawasan Ekonomi Baru Di Provinsi Jambi. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 16(1), 39. <https://doi.org/10.15578/jkpi.16.1.2024.39-50>
- Riwukore, J. R., Fuah, A. M., Abdullah, L., Priyanto, R., Yani, A., Purwanto, B. P., & Habaora, F. (2021). Profile of Farmers Based Feed Management and Animal Health of Bali Cattle in Agroecosystem Variation at Timor Island. *Buletin Peternakan*, 45(2), 129. <https://doi.org/10.21059/buletinpeternek.v45i2.49417>
- Rochman, F., Jatmiko, I., & Fahmi, Z. (2018). Dinamika Industri Rawai Tuna Di Pelabuhan Benoa. *Marine Fisheries Journal of Marine Fisheries Technology and Management*, 9(2), 209–220. <https://doi.org/10.29244/jmf.9.2.209-220>
- Rubianti, F. S., Hartono, N., & Erfina, E. (2023). Pengujian Kualitas Sistem Pelaporan Kegiatan Praktek Kerja Lapangan Siswa Menggunakan Metode McCall. *Jurnal Fasikom*, 13(3), 340–348. <https://doi.org/10.37859/jf.v13i3.5637>
- Rulandari, N., & Alvin, G. F. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Pengawasan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan Tahun 2017 – 2019). *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 4(1), 70–97. <https://doi.org/10.47134/villages.v4i1.48>
- Rusmilyansari, R., & Mahreda, E. S. (2019). Resolusi Konflik Nelayan Di Perairan Teritorial Kabupaten Kotabaru. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 11(2), 89. <https://doi.org/10.15578/jkpi.11.2.2019.89-99>
- Sari, I. P., & Wibowo, I. M. S. M. (2023). Hasil Tangkapan Utama Dan Sampingan Alat Tangkap Purse Seine Di Pelabuhan Perikanan Pantai (Ppp) Bajomulyo, Jawa Tengah. *Jurnal Perikanan Unram*, 13(2), 447–455. <https://doi.org/10.29303/jp.v13i2.542>
- Sari, Y. T. W., & Satria, A. (2015). Akses Nelayan Terhadap Sumber Daya Pesisir Di Kawasan Pertambangan. *Sodality Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 5(3). <https://doi.org/10.22500/sodality.v5i3.9695>
- Setiawan, K. H., & Setyorini, D. (2022). Analisis Yuridis Penangkapan Ikan Tanpa Siup Dan Sipi Oleh Kapal Berbendera Asing. *Reformasi Hukum Trisakti*, 4(5), 1189–1198. <https://doi.org/10.25105/refor.v4i5.15119>

- Sianturi, I. T., Lestari, S., & Nalle, M. M. D. (2022). Pengamatan Ektoparasit Pada Ikan Nila Di Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya DIY, Argomulyo, Cangkringan, Sleman. *Jurnal Vokasi Ilmu-Ilmu Perikanan (Jvip)*, 2(1), 11. <https://doi.org/10.35726/jvip.v2i1.566>
- Sudrajat, D. (2019). Kelimpahan Ikan Karang Pada Atraktor Cumi-Cumi Bahan Pipa PVC. *Jurnal Kelautan Nasional*, 14(2). <https://doi.org/10.15578/jkn.v14i2.7234>
- Sudrajat, D., & Madyantoro, H. I. (2022). Strategi Pengembangan Atraktor Cumi -Cumi Untuk Pengayaan Stok. *Buletin Jalanidhitah Sarva Jivitam*, 4(1), 77. <https://doi.org/10.15578/bjsj.v4i1.11348>
- Suhana, S., Kusumastanto, T., Adrianto, L., & Fahrudin, A. (2019). Model Ekonomi Pengelolaan Sumber Daya Cakalang Di Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 14(1), 23. <https://doi.org/10.15578/jsekp.v14i1.7048>
- Suharyanto, S., Goenaryo, G., Dewi, P., Hidayat, T., & Efyanto, T. K. (2022). Perbandingan Cantrang Dengan Jaring Tarik Berkantong Di Tegal. *Prosiding Seminar Nasional Perikanan Indonesia*, 133. <https://doi.org/10.15578/psnp.11937>
- Suman, A., Prisantoso, B. I., Satria, F., & Rahmat, E. (2017). Komposisi Jenis, Penyebaran, Dan Kepadatan Stok Ikan Demersal Laut Dalam Di Perairan Samudera Hindia Selatan Jawa Dan Barat Sumatera. *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia*, 13(1), 43. <https://doi.org/10.15578/jppi.13.1.2007.43-52>
- Syahrir, N., Ansari, M. I., & Basir, I. (2023). Pendampingan Tata Kelola Keuangan Dan Pemasaran Berbasis Digital Dalam Meningkatkan Penjualan. *Jurnal Abdi Insani*, 10(3), 1639–1646. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v10i3.1083>
- Tawaqal, M. I., Yusfiandayani, R., & Imron, M. (2020). Analisis Fishing Activity Kapal Tuna Longline Menggunakan Vessel Monitoring System Yang Berbasis Di Benoa Bali. *Jurnal Teknologi Perikanan Dan Kelautan*, 10(1), 109–119. <https://doi.org/10.24319/jtpk.10.109-119>
- Trenggono, S. W. (2023). Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Untuk Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Di Indonesia. *Jurnal Kelautan Dan Perikanan Terapan (Jkpt)*, 1, 1. <https://doi.org/10.15578/jkpt.v1i0.12057>
- Wibisono, M. R. A., & Pandamdari, E. (2020). Kajian Yuridis Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Di Laut Maluku Utara (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 153/Pid.Sus/2014/Pn.TTE). *Reformasi Hukum Trisakti*, 2(1). <https://doi.org/10.25105/refor.v2i1.10475>
- Wijaya, R. A., Triyanti, R., Zamroni, A., Wahab, I., & Alwi, D. (2021). Ketimpangan Pendapatan Dan Pengeluaran Nelayan Di Kabupaten Pulau Morotai. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 7(2), 125. <https://doi.org/10.15578/marina.v7i2.10249>
- Yonvitner, Y., Boer, M., Akmal, S. G., & Andi, I. S. (2018). Kerentanan Intrinsik Dan Risiko Pemanfaatan Perikanan: Analisis Berbasis Data Poor Untuk Pengelolaan Berkelanjutan. *Tropical Fisheries Management Journal*, 2(2), 54. <https://doi.org/10.29244/jppt.v2i2.27369>
- Yusfiandayani, R., Imron, M., Mawardi, W., Baskoro, M. S., Raihan, M. R., Rahmad, A., Aziz, R. N., & Wahdati, F. C. (2024). Produktivitas Alat Tangkap Purse Seine Pada Rumpon Portable Di Perairan Karang Jeruk, Tegal. *Albcore Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, 8(1), 011–022. <https://doi.org/10.29244/core.8.1.011-022>
- Yusrizal, Y., Kusumo, T., & Rachmalio, M. F. (2022). Studi Tentang Hasil Tangkapan Pukat Cincin (Purse Seine) Ditinjau Dari Daerah Penangkapan Ikan Pada KM. Anugrah Di Wilayah Laut Banda – WPP 714. *Jurnal Kelautan Dan Perikanan Terapan (Jkpt)*, 4(2), 127. <https://doi.org/10.15578/jkpt.v4i2.10400>

- Yuwandana, D. P., Agustina, S., Destianis Hartati, I., Retnoningtyas, H., Simeon, B. M., Darmono, O. P., Warmia, A., & Yulianto, I. (2021). Keberlanjutan Sumberdaya Ikan Kurisi (*Nemipterus Japonicus*) Di Perairan Teluk Banten. *ALBACORE*, 5(3), 303–312.
- Zainuri, M. A. A. M., & Farid, A. (2023). Analisis Produktivitas Alat Tangkap Cantrang Di Pelabuhan Branta Pesisir Tlanakan, Pamekasan Madura. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 15(2), 71. <https://doi.org/10.15578/jkpi.15.2.2023.71-79>
- Zulaika, S., Harsono, I., Mahmudin, T., Yahya, A. S., & Sutanto, H. (2024). Pengaruh Kebijakan Pemerintah Dan Kemitraan Bisnis Dalam Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Terhadap Kesejahteraan Nelayan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Selatan. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 3(01), 41–55. <https://doi.org/10.58812/jmws.v3i01.944>
- Zulkarnain, Z., Meilinda, D., Wahju, R. I., & Purwangka, F. (2023). Penggunaan Atraktor Umpan Ikan Rucah Yang Dilarutkan Cumi-Cumi (*Loligo Spp.*) Pada Jaring Rampus Di Palabuhanratu. *Albacore Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, 6(2), 113–125. <https://doi.org/10.29244/core.6.2.113-125>.